

MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERKELANJUTAN: STUDI KASUS DI KABUPATEN JENEPONTO

Strengthening Local Government Governance for Sustainable Poverty Alleviation: A Case Study in Jeneponto Regency

Ahmad Zihar Mubaraq ^{1*}, Rasyid Thaha ², Irwan Ade Saputra ³

¹Program Sarjana Ilmu
Pemerintahan, Departemen
Ilmu Pemerintahan, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia

^{2,3} Departemen Ilmu
Pemerintahan, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin,
Indonesia

*Correspondence author:
ahmadziharm@gmail.com

Keywords: *Poverty; Local
Government; Social
Programs; Institutional
Capacity; Jeneponto*

Kata Kunci: *Kemiskinan;
Pemerintah Daerah;
Program Sosial; Kapasitas
Kelembagaan; Jeneponto.*

DOI:
<https://10.61731/dpmr.v5i2.45915>

Abstract

Poverty remains one of the fundamental challenges faced by local governments, including Jeneponto Regency, which continues to record a relatively high poverty rate compared to other regions in South Sulawesi Province. This study aims to analyze the role of the Jeneponto Regency Government in poverty reduction efforts and to identify factors influencing the effectiveness of its programs. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving key informants from local government officials and program beneficiaries. The findings reveal that the local government has undertaken significant initiatives through the implementation of social assistance programs, community economic development, and the enhancement of infrastructure and basic services. However, several challenges hinder program success, including budget constraints, weak inter-agency coordination, and limited community participation. The study recommends strengthening institutional synergy, improving bureaucratic capacity, and encouraging active community engagement in all stages of program implementation to achieve more effective and sustainable poverty alleviation.

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh daerah, termasuk Kabupaten Jeneponto, yang dikenal memiliki tingkat kemiskinan relatif tinggi dibanding kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam upaya penanggulangan kemiskinan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program-program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi,

Copyright: © 2025 Ahmad Zihar
Mubaraq, Rasyid Thaha, Irwan Ade
Saputra
This work is licensed under CC BY-NC
4.0. To view a copy of this license, visit
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

dan dokumentasi, serta melibatkan berbagai informan dari unsur pemerintah daerah dan masyarakat penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Jeneponto telah menjalankan peran penting melalui pelaksanaan program bantuan sosial, pengembangan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar. Namun, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi keberhasilan program, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi, serta lemahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan sinergi kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program sebagai strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai suatu keadaan tidak adanya atau suatu keadaan kekurangan uang dan barang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kemiskinan telah mengalami perluasan makna seiring dengan semakin banyaknya penyebab, indikator yang mengiringinya (Yuliarmi & Arka, 2014). Tidak hanya pada dimensi ekonomi, kemiskinan merambah kepada berbagai dimensi seperti dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, politik. Jika pada dimensi ekonomi berupa ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam dimensi politik dapat berupa tidak adanya wadah organisasi yang dapat memperhatikan kaum miskin ataupun pembatasan akses-akses politik, pada dimensi sosial seperti masyarakat miskin tidak terintegrasikan dalam institusi sosial yang ada serta menjamurnya budaya kemiskinan yang terus menerus memperparah kualitas sumber daya manusia dan prinsip kerja masyarakat (Asfi & Wijaya, 2015).

Menurut Yunus yang dikutip Rafsanjani (2017) bahwa kemiskinan bukan diciptakan oleh masyarakat miskin tapi diciptakan oleh sistem yang ada di masyarakat. Namun apabila kita semua tidak peduli terhadap kemiskinan berarti kita juga menjadi bagian dari sistem yang menciptakan kemiskinan itu sendiri. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Pendekatan lainnya mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau keluarga yang tidak dapat menggunakan fungsinya di dalam masyarakat. Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berjalannya waktu, tetapi pada dasarnya kemiskinan berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh orang miskin tersebut, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997).

Untuk mengetahui peranan pemerintah daerah dalam Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan perlu adanya penyamaan indikator dalam hal seseorang atau sekelompok orang dikatakan miskin ataupun berdaya. Sehingga apabila indikator yang digunakan menjadi rujukan bersama akan mempermudah dalam hal penentuan

seseorang atau kelompok telah berdaya ataupun tetap miskin. Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia secara resmi dilakukan oleh BPS sejak tahun 1984. Metode penghitungan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan kebutuhan dasar (*basic need approach*) dimana komponen kebutuhan dasar terdiri dari makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan berdasarkan hasil survey sosial ekonomi nasional.

Siagian (2005) menyampaikan beberapa hal terkait dengan fungsi pemerintahan. Menurutnya pemerintah memiliki lima fungsi yaitu fungsi pemeliharaan ketertiban dan ketenangan, fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi perpajakan, fungsi hukum, dan fungsi administratif. Pemerintah merupakan subyek terpenting dalam hal penanggulangan masalah kemiskinan. Hal ini terlihat dengan dibuatnya kebijakan khusus untuk penangan kemiskinan yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Selain dari pada itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, membentuk suatu lembaga percepatan penanggulangan kemiskinan yang terstruktur dari tingkat nasional hingga kepada tingkat kabupaten kota.

Kabupaten Jeneponto menjadi salah satu contoh dari dampak yang terasa akibat masalah kemiskinan yang belum tuntas. Di tengah kemajuan dan perubahan yang terjadi di sejumlah wilayah, tingkat kemiskinan yang tetap tinggi di Jeneponto menjadi sorotan penting. Hal ini tercermin jelas melalui data resmi terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang menyoroti tingginya angka kemiskinan di kabupaten tersebut. Dinamika kompleks kemiskinan ini memerlukan pemahaman mendalam serta upaya bersama dari berbagai pihak untuk menjembatani kesenjangan dan membangun solusi yang berkelanjutan.

Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merambak dampaknya tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi, tetapi juga memengaruhi strata kabupaten dan kota di seluruh negeri. Kabupaten Jeneponto, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Data terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan secara khusus memperlihatkan situasi ini, sebagaimana yang tercermin pada gambar di bawah ini:

Tabel 1. Persentase penduduk miskin (p0) menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (persen), 2020-2022

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Persen) (Persen)		
	2020	2021	2022
Kepulauan Selayar	12.48	12.45	12.24
Bulukumba	7.10	7.43	7.39
Bantaeng	8.95	9.41	9.07

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Persen) (Persen)		
	2020	2021	2022
Jeneponto	14.58	14.28	13.73
Takalar	8.44	8.25	8.25
Gowa	7.38	7.54	7.36
Sinjai	9.00	8.84	8.80
Maros	9.74	9.57	9.43
Pangkep	13.96	14.28	13.92
Barru	8.26	8.68	8.40
Bone	10.68	10.52	10.58
Soppeng	7.59	7.53	7.49
Wajo	6.95	6.46	6.57
Sidrap	5.05	5.04	5.11
Pinrang	8.86	8.81	8.79
Enrekang	12.17	12.47	12.39
Luwu	12.65	12.53	12.49
Tana Toraja	12.10	12.27	12.18
Luwu Utara	13.41	13.59	13.22
Luwu Timur	6.85	6.94	6.81
Toraja Utara	12.01	11.99	11.65
Makassar	4.54	4.82	4.58
Pare Pare	5.44	5.40	5.41
Jeneponto	7.85	8.14	7.78
SULAWESI SELATAN	8.72	8.78	8.63

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebanyak 50,59 ribu jiwa, dengan presentase kemiskinan mencapai 13,73 persen, meskipun begitu tingkat kemiskinan di Kabupaten Jeneponto cenderung mengalami penurunan hal ini bisa dilihat dari data BPS hasil analisis Presentasi Penduduk Miskin (P0) Menurut Kota/Kabupaten se-Sulawesi Selatan Tahun 2010-2022. Dari data tersebut dapat kita lihat progres Penanggulangan kemiskinan dari tahun 2010 hingga 2022 di Kabupaten Jeneponto mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dimana pada tahun 2010 data persentase penduduk miskin Kabupaten Jeneponto berada pada angka 19,09 persen dan tahun 2023 tersisa 13,73. Penurunan persentase penduduk miskin Jeneponto dari tahun 2010 hingga 2021 mencapai 5,36 persen. Terlepas dari hal itu, kita tidak bisa berpaling dari fakta dan data yang ada bahwa Kabupaten Jeneponto masih merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan per-Tahun 2023.

Permasalahan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto mencerminkan tantangan struktural dan kelembagaan yang belum sepenuhnya teratasi melalui program pemerintah daerah. Meskipun berbagai intervensi telah dilakukan seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur dasar, hasilnya belum menunjukkan penurunan signifikan terhadap angka kemiskinan. Hambatan seperti keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala utama.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran dan strategi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto, dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi program-program penanggulangan kemiskinan tersebut?

Kajian Literatur

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan tempat tinggal. Menurut Todaro dan Smith (2011), kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan pola temporalnya, antara lain: kemiskinan kronis (kemiskinan persisten), kemiskinan siklis, kemiskinan musiman, dan kemiskinan aksidental, seperti yang diakibatkan oleh bencana atau kebijakan ekonomi tertentu. Klasifikasi ini membantu pemerintah memahami kompleksitas dimensi kemiskinan yang dihadapi, terutama dalam merencanakan intervensi kebijakan.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) mendefinisikan garis kemiskinan sebagai batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan pangan dan nonpangan. Jika pengeluaran per kapita seseorang berada di bawah garis ini, mereka dikategorikan miskin. Dalam konteks Jeneponto, indikator ini menunjukkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi dan memerlukan pendekatan lintas sektoral untuk mengatasinya.

Peran Pemerintah Daerah di Penanggulangan Kemiskinan

Dalam sistem desentralisasi Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan penting dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sosial, termasuk program pengentasan kemiskinan. Menurut Siagian (2005), pemerintah daerah berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik yang harus mampu menanggapi kebutuhan masyarakat secara langsung melalui layanan publik, program pemberdayaan, dan distribusi kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa urusan sosial dan kesejahteraan termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar.

Hal ini berarti bahwa pemda bertanggung jawab untuk merancang kebijakan dan program berbasis kebutuhan lokal yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.

Berbagai studi mengidentifikasi beberapa strategi utama yang sering digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Pertama, program bantuan sosial, baik berupa bantuan tunai maupun subsidi kebutuhan pokok (Bappenas, 2020). Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, melalui pelatihan, akses permodalan, dan fasilitasi UMKM (Suharto, 2005). Ketiga, Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan layanan pendidikan serta kesehatan (Bank Dunia, 2012). Meskipun demikian, penelitian Suharto (2010) menegaskan bahwa keberhasilan program pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh faktor perencanaan partisipatif, kapasitas birokrasi, dan kemitraan dengan aktor lokal.

Faktor Penghambat Efektivitas Program Kemiskinan

Meskipun telah banyak kebijakan yang dirancang, kenyataannya banyak program penanggulangan kemiskinan yang belum menunjukkan dampak signifikan. Salah satu penyebab adalah rendahnya koordinasi antarsektor dan antarinstansi pemerintah, yang membuat pelaksanaan program sering tumpang tindih atau tidak tepat sasaran (Kuncoro, 2010).

Keterbatasan anggaran daerah juga menjadi tantangan utama. Daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah, seperti Jenepono, sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam menciptakan program yang kontekstual dan berkelanjutan (Prasetyo, 2015).

Faktor lainnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program. Dalam model pembangunan partisipatif, masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga subjek yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (Chambers, 1995). Rendahnya partisipasi ini menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap program yang dijalankan, sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas dan keinginan program.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi realitas sosial dan proses kebijakan dari perspektif para pelaku yang terlibat langsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jenepono, Sulawesi Selatan, yang dipilih karena merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi serta memiliki beragam program pengentasan kemiskinan yang dapat dianalisis secara mendalam.

Pengumpulan data dilakukan dalam tiga bulan di tahun 2022 melalui teknik purposive sampling, yakni pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang

relevan dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas pejabat dari Dinas Sosial dan Bappeda, kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga penerima manfaat program bantuan sosial. Proses pemilihan informan berlanjut hingga mencapai titik jenuh, yaitu ketika informasi yang diperoleh tidak lagi menunjukkan variasi signifikan.

Data diperoleh melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif terhadap pelaksanaan program di lapangan, dan studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka yang memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terkait implementasi program penanggulangan kemiskinan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi atau matriks untuk memudahkan penelusuran hubungan antarkategori data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan tetap memperhatikan konsistensi data dan validitas informasi yang diperoleh. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan kekuatan argumen dan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari tiga aspek utama yaitu peran sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, fungsi pemerintah adalah mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan, tanpa memberikan beban berlebihan kepada mereka. Keterlibatan pemerintah yang optimal diperlukan untuk memajukan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator merupakan landasan penting dalam upaya ini. Melalui peran sebagai regulator, pemerintah menciptakan kebijakan dan aturan yang mempengaruhi upaya penanggulangan kemiskinan.

Sebagai dinamisator, pemerintah menjadi motor penggerak dalam mengkoordinasikan berbagai pihak untuk berpartisipasi aktif dalam program-program penanggulangan kemiskinan. Sebagai fasilitator, pemerintah memfasilitasi berbagai kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pihak terkait untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. Dengan memahami dan mengoptimalkan peran tersebut, pemerintah Kabupaten Jeneponto dapat berperan secara efektif dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Sebagai regulator, Pemerintah Daerah berperan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kebijakan dan pembangunan di tingkat lokal, pemerintah Kabupaten Jeneponto memiliki peran penting dalam menangani masalah kemiskinan. Melalui serangkaian peraturan dan pedoman yang ditetapkan, pemerintah berusaha untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung upaya penanggulangan kemiskinan secara efektif dan efisien.

Salah satu instrumen kebijakan yang menjadi pedoman utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto nomor 16 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Dalam konteks ini, Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto memegang peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto, dinas ini memiliki tanggung jawab dalam membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dengan demikian, peran pemerintah sebagai regulator dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Jeneponto mencakup berbagai aspek, mulai dari penyusunan kebijakan hingga implementasi program-program konkrit yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan kerja keras dan kolaborasi yang sinergis, diharapkan Kabupaten Jeneponto dapat menjadi contoh yang inspiratif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator

Sebagai Dinamisator, pemerintah di Kabupaten Jeneponto memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan dan memelihara dinamika pembangunan daerah, terutama dalam penanganan masalah kemiskinan. Dinamika pembangunan daerah tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kesejahteraan sosial masyarakatnya. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai penggerak utama untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah sebagai Dinamisator diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan yang efektif kepada masyarakat, sehingga partisipasi mereka dalam proses pembangunan dapat ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam kondisi kurang mampu.

Salah satu indikator keberhasilan peran pemerintah sebagai Dinamisator dalam menangani fakir miskin di Kabupaten Jeneponto adalah dengan memperhatikan

sejumlah aspek tertentu. Salah satunya adalah dengan memastikan adanya bimbingan dan arahan yang intensif kepada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan, seperti fakir miskin.

Pemerintah Daerah sebagai dinamisator dalam penanganan kemiskinan tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan materiil, tetapi juga melibatkan upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dengan mendukung kemandirian dan kapasitas masyarakat, diharapkan mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Terkait penanganan fakir miskin di Kabupaten Jeneponto, peran pemerintah sebagai Dinamisator juga tercermin dalam upaya memperkuat kelembagaan dan menyediakan arahan serta bimbingan kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat yang kurang mampu.

Peran pemerintah sebagai Dinamisator dalam penanganan masyarakat miskin di Kabupaten Jeneponto melibatkan berbagai upaya, mulai dari penyediaan bantuan sosial hingga pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan berdaya bagi semua warga Kabupaten Jeneponto.

Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Sebagai fasilitator pemerintah, Dinas Sosial, khususnya dalam Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu bentuk fasilitas yang disediakan adalah Rumah Bakat, tempat untuk membina berbagai kelompok yang membutuhkan bantuan sosial, seperti korban sosial, lansia, gelandangan, anak-anak, dan lain sebagainya. Dinas Sosial bertanggung jawab merancang dan melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai fasilitator dengan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan oleh kelompok fakir miskin, baik itu dalam bentuk pelatihan, pendidikan, peningkatan keterampilan, maupun fasilitas sarana dan prasarana guna mengatasi kemiskinan di Kabupaten Jeneponto.

Peran pemerintah sebagai fasilitator yang terlibat langsung dalam penanganan fakir miskin di Kabupaten Jeneponto melibatkan berbagai tenaga, termasuk tenaga bantuan sumber daya manusia (SDM). Hal ini dilakukan karena tingkat kemiskinan di Jeneponto relatif tinggi. Dinas Sosial perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program penanganan fakir miskin di wilayah tersebut. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jeneponto secara keseluruhan. Dengan melibatkan banyak tenaga dan melakukan evaluasi secara berkala, pemerintah dapat memperbaiki dan mengoptimalkan program-program penanganan fakir miskin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.

Penanganan kemiskinan merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah. Program-program penanggulangan kemiskinan harus mencakup upaya pemberdayaan masyarakat, pendampingan dalam pengembangan kewirausahaan, dan peningkatan akses terhadap modal ekonomi. Dengan memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program penanggulangan kemiskinan, diharapkan masyarakat akan merasa memiliki program tersebut dan lebih termotivasi untuk berperan aktif dalam mengatasi kemiskinan.

Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto

Pemerintah Kabupaten Jeneponto menunjukkan tekad yang kuat untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakatnya melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang serius. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah mengimplementasikan sejumlah program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah mereka. Upaya ini mencakup pemberian bantuan sosial kepada kelompok rentan serta berbagai inisiatif untuk memberdayakan ekonomi lokal. Dengan demikian, regulasi dan program atau kebijakan kian di gencarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto sebagai sebuah bentuk komitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakatnya melalui langkah-langkah konkret dalam memerangi kemiskinan.

Regulasi dan Program Daerah Terkait Penanggulangan Kemiskinan

Di dalam Permendagri 53/2020 disebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Jika diamati dengan seksama, Permendagri ini menegaskan dua hal terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu: (i) bahwa upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan perencanaan yang baik; dan (ii) bahwa sinergitas dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk menanggulangi kemiskinan.

Selanjutnya di dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui strategi dan program. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran penanggulangan kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

1. Pengurangan beban produksi masyarakat miskin;
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
4. Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Sedangkan program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto telah mermbuat beberapa regulasi yang terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Kebijakan tersebut telah diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk strategi dan program penanggulangan kemiskinan. Untuk tahun berjalan (2022), strategi penanggulangan kemiskinan tetap berfokus pada 5 (lima) strategi utama, yaitu:

1. Pendataan warga miskin secara akurat dan terpadu;
2. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
3. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
4. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
5. Menyinerigikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Seluruh pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jeneponto, sebuah organisasi yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan. Pengoordinasian penanggulangan kemiskinan oleh TKPDK dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Pengoordinasian penyusunan RPKD dan RAT penanggulangan kemiskinan;
2. Pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

3. Pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan RKPD;
4. Pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
5. Pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Jeneponto atau yang sekarang telah berubah menjadi Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan sebuah panduan untuk seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto. RKPD ini membentuk sebuah kerangka kerja penting dalam mengatasi masalah kemiskinan di wilayah ini. Sebagai bagian integral dari RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD selama lima tahun ke depan, fokusnya adalah pada perbaikan pengelolaan kebijakan dan keuangan daerah. Tujuannya adalah mengalihkan pengeluaran yang tidak tepat sasaran, sambil meningkatkan anggaran pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi miskin.

Pendekatan ini memerlukan dukungan terintegrasi dari berbagai pihak, menciptakan good governance yang didasarkan pada partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Menggandeng seluruh pelaku pembangunan, mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, perguruan tinggi, LSM, hingga swasta dan lembaga internasional, menjadi kunci utama.

RPKD memberikan panduan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan dan kemungkinan penyesuaian atas perubahan kondisi baik di tingkat nasional maupun lokal tetap terbuka. Dengan demikian, RPKD menjadi instrumen yang dinamis dan responsif, bertujuan untuk mencapai hasil nyata dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Upaya penanggulangan kemiskinan Pemerintah Jeneponto ditempuh melalui 4 (empat) langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha, yakni pemerintah bersama stakeholder dan masyarakat menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin;
2. Pemberdayaan masyarakat, yakni pemerintah, stakeholder dan masyarakat memberdayakan masyarakat miskin agar dapat memperoleh kembali hak-hak ekonomi, sosial dan politik, serta mengontrol keputusan yang menyangkut kepentingannya, menyalurkan aspirasi, mengidentifikasi masalah dan kebutuhannya sendiri (kemandirian lokal);

3. Peningkatan kemampuan (capacity building) aparat pemerintah, yakni peningkatan kemampuan aparatur dan instansi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan secara lebih sinergis, efektif dan produktif;
4. Perlindungan sosial dan penegakkan hak asasi manusia (HAM), yakni pemerintah melalui kebijakan publik mengajak seluruh stakeholder dan masyarakat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin, utamanya kelompok masyarakat yang paling miskin (fakir miskin, orang jompo, anak terlantar, dan cacat), kelompok masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencana alam, konflik sosial dan dampak negatif krisis ekonomi.

Upaya ini diarahkan untuk memberikan dampak langsung pada perbaikan pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga miskin, serta terkait dengan kemajuan sektor agribisnis dan potensi wilayah secara umum. Tujuannya melibatkan peningkatan kinerja mata pencaharian rumah tangga miskin, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan kemajuan agropolitan lokalitas daerah. Upaya-upaya melibatkan perbaikan modal dan sarana produksi, teknologi dan proses produksi, pengolahan, dan pemasaran rumah tangga miskin, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jeneponto harus dilakukan secara terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang seringkali digunakan untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan, seperti tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan harus ditetapkan targetnya. Penetapan indikator dan target semacam ini penting untuk mengarahkan seluruh upaya penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan dalam jangka pendek (1 tahun). Angka perkiraan 2021 dan proyeksi 2022 didasarkan pada skenario moderat dengan mempertimbangkan trend data dan kondisi Pandemi Covid-19.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Utama Penanggulangan Kemiskinan Kab. Jeneponto

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Perkiraan 2021	Target 2022
1	Tingkat Kemiskinan	%	14,58	14,25	13,86
2	Jumlah Penduduk Miskin	Orang	52.240	52.376	51.212
3	Indeks kedalaman Kemiskinan	Poin	2,60	2,50	2,40
4	Indeks Keparahannya Kemiskinan	Poin	0,68	0,65	0,62

Sumber: Bappeda Kab. Jeneponto (2022)

Selain menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto juga perlu menetapkan Indikator

Kinerja Kunci (IKK) untuk mengukur keberhasilan penanggulangan kemiskinan berdasarkan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Penetapan IKK beserta targetnya yang bersifat sektoral sangat penting untuk mengarahkan seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam upaya penanggulangan kemiskinan selama satu tahun ke depan.

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Kunci Penanggulangan Kemiskinan Kab. Jeneponto

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Perkiraan 2021	Target 2022
1	Presentase anak usia 7-12 tahun dari RT miskin yang berpartisipasi dalam Pendidikan SD atau Sederajat	%	66,68	67,68	68,68
2	Presentase anak usia 7-12 tahun dari RT miskin yang berpartisipasi dalam Pendidikan SMP atau Sederajat	%	38,277	39,77	42,27
3	Presentase penduduk RT miskin yang mendapatkan layanan Kesehatan	%			
4	Presentase RT peduduk miskin yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	%	42,13	43,56	45,00
5	Presentase RT miskin yang memiliki rumah layak huni	%	8,63	9,63	10,63
6	Presentase Individu dari RT peduduk miskin yang mendapatkan pelatiha tenaga kerja	%			
7	Presentase individu dari RT peduduk miskin belum bekerja yang mendapatkan penempatan kerja	%			
8	Presentase RT miskin yang rawan pangan	%	50,44	50,44	45,50
9	Presentase RT miskin petani yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian	%	16,47	17,78	17,96
10	Presetase penduduk miskin yang mendapatkan sarana dan prasarrana produksi perikanan	%	0,44	0,58	0,70
11	Presentase RT miskin yang memiliki usaha yang mendapatkan bantuan social dari pemerintah daerah	%	0,24	0,27	0,70

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Perkiraan 2021	Target 2022
12	Presentase penduduk miskin yang mendapatkan bantuan social dari pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00
13	Presentase disabilitas yang mendapatkan bantuan social dari pemerintah daerah	%	38,55	39,00	45,00
14	Presentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah	%	65,00	67,50	70,00

Sumber: Bappeda Kab. Jenepono (2022)

Diskusi

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jenepono telah melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang mencakup bantuan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, dan program pemberdayaan masyarakat. Peran pemerintah dalam hal ini sesuai dengan pandangan Suharto (2005) yang menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kapasitas institusi publik dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial secara simultan.

Namun demikian, implementasi program-program tersebut masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Beberapa masalah yang mencuat adalah lemahnya perencanaan berbasis data, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta dominasi pendekatan karitatif dibandingkan dengan pendekatan pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan kritik Dunn (2003) bahwa kegagalan kebijakan publik sering kali terjadi karena kurangnya pemanfaatan informasi yang valid dan kurangnya partisipasi dalam proses perumusan kebijakan. Temuan ini juga memperkuat argumen Kuncoro (2010) bahwa kebijakan ekonomi pembangunan yang tidak terintegrasi dengan realitas sosial masyarakat rentan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Sebagian besar program yang dijalankan pemerintah daerah masih bersifat jangka pendek dan cenderung menumbuhkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Program-program seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sembako memang penting dalam konteks darurat, namun tidak cukup untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural. Padahal, Suharto (2010) menggarisbawahi pentingnya kebijakan sosial sebagai instrumen strategis yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif dan promotif. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan semestinya menekankan pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas, melalui pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar.

Selain itu, koordinasi lintas sektor di Jenepono belum berjalan secara optimal. Dinas Sosial, Bappeda, dan perangkat daerah lainnya belum sepenuhnya menyinergikan

program-program mereka dalam satu kerangka kebijakan terpadu. Hal ini mengakibatkan tumpang tindih program, inefisiensi anggaran, dan kebingungan di tingkat pelaksana. Papilaya (2020) menegaskan bahwa koordinasi kelembagaan yang lemah menjadi salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat daerah.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program juga masih minim. Padahal, prinsip *good governance* menuntut pelibatan aktif warga dalam setiap tahap siklus kebijakan publik. Suharto (2010) menyatakan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai objek, melainkan juga subjek pembangunan. Ketidadaan partisipasi masyarakat menyebabkan banyak program tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, dan bahkan menimbulkan resistensi sosial. Untuk itu, pendekatan partisipatif dalam perencanaan dan monitoring sangat penting agar program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil warga miskin.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam penanggulangan kemiskinan sudah berada pada arah yang benar, namun masih perlu diperkuat dari sisi kelembagaan, perencanaan berbasis data, integrasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat. Perbaikan-perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya reaktif, melainkan transformatif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah harus bergeser dari sekadar pelaksana program menjadi fasilitator pembangunan berbasis masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti peran strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang dilaksanakan melalui berbagai program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur dasar. Temuan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi sebagai fasilitator, pelaksana, sekaligus mitra dalam berbagai inisiatif pengentasan kemiskinan.

Namun demikian, efektivitas dari program-program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi antara lain adalah keterbatasan anggaran daerah, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Hal ini menyebabkan banyak program tidak berjalan secara optimal atau tidak berkelanjutan.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan program dan kondisi riil di lapangan, termasuk dalam hal pendataan warga miskin dan pengawasan distribusi bantuan. Ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat juga menjadi kendala dalam pengembangan inisiatif lokal yang berbasis pada potensi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan agenda kebijakan berikut kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Pertama, memperkuat kelembagaan dan kapasitas aparatur dalam merancang serta mengimplementasikan kebijakan pengentasan kemiskinan secara lebih kontekstual dan berbasis data. Kedua, meningkatkan koordinasi lintas sektor dan antarorganisasi perangkat daerah untuk menciptakan integrasi program yang sinergis. Ketiga, mendorong pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, untuk meningkatkan efektivitas dan rasa kepemilikan terhadap program. Keempat, Mengembangkan strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, tidak semata-mata berbasis bantuan sosial, tetapi juga berbasis pada penguatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya ekonomi lokal.

Dengan upaya yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, diharapkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jeneponto tidak hanya bersifat simbolik atau reaktif, tetapi mampu menciptakan perubahan struktural menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. <https://sulsel.bps.go.id>
- Bappeda Kabupaten Jeneponto. (2022). Laporan pencapaian kinerja Kabupaten Jeneponto tahun 2021. Jeneponto: Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1), 173–204.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar analisis kebijakan publik (ed. 2). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunawan, I. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuncoro, M. (2010). Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mikelsen, B. (2003). *Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners*. London: SAGE.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Papilaya, J. (2020). Kebijakan publik dalam penanggulangan kemiskinan: Suatu kajian peranan pemerintah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 4(1), 77–84.

- Prasetyo, E. (2015). *Pembangunan Daerah dan Politik Anggaran: Evaluasi Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rafsanjani, M. (2017). *Pembangunan dan Kemiskinan: Kajian Kritik terhadap Sistem dan Solusi Alternatif*. Bandung: Pustaka Rakyat.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Dimensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharto, E. (2005). *Strategi dan Model Penanggulangan Kemiskinan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2010). *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (edisi ke-11, terj. Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- World Bank. (2012). *Targeting Poor and Vulnerable Households in Indonesia*. Jakarta: World Bank Indonesia.
- Yuliarmi, N. N., & Arka, I. M. (2014). Kemiskinan dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 12-23.